



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TRIWULAN I TAHUN 2022



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

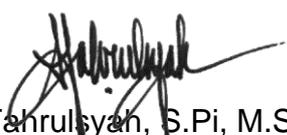
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2022 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan I Tahun 2022 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 April 2022

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan


Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2022, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; ⁽³⁾

Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Operasi Armada pengawasan SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2022, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 25 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan I Tahun 2022, dari 25 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 9 (sembilan) IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%), IKU berwarna kuning tidak ada, IKU berwarna merah tidak ada, serta 16 (enam belas) IKU berstatus Putih (tidak ada skor),

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Maret 2022 sebesar **19,47%** atau sebesar Rp **6.672.377.324,-** (*Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **34.265.069.000,-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2022.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi.....	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022.....	13
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.....	13
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	16
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.	16
2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan	23
3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	34
4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif	36
5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.....	39
6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif.....	41
7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	47

PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
LAMPIRAN	59

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022	9
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022.....	13
Tabel 3. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	18
Tabel 5. Pelaku usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	18
Tabel 6. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	21
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan	24
Tabel 8. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	25
Tabel 9. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidaya ikan.....	26
Tabel 10. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	26
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan.....	30
Tabel 12. Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	30
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan.....	32
Tabel 14. Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	32
Tabel 15. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif.....	36
Tabel 16. Capaian IKU pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”	40
Tabel 17. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif.....	41
Tabel 18. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.....	43
Tabel 19. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan	44
Tabel 20. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2022	56

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Belawan	48
Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPi Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	49
Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
- b. Penindakan/ pengenaan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran/kejahatan.
- c. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 6 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 23A/ KEP-DJPSDKP/ 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakan melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2022 berjumlah Sasaran Kegiatan (SK) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 25 (Dua puluh lima). Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (dua puluh lima) IKU. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2022 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian (%)	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN							
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	25	100	120,00%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN							
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100,00%
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN							
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	-	-	-
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5	-	-	-
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87,5	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian (%)
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	-	-	-
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	35	96	120,00%
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	10	90	120,00%
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	10	86	120,00%
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	-	-	-
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	-	-	-
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP							
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	90,33	112,91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian (%)
		ISK5.1.2 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	91,75	114,69%
		ISK5.1.3 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	-	-	-
		ISK5.1.4 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77	-	-	-
		ISK5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90	-	-	-
		ISK5.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	-	-	-
		ISK5.1.7 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	-	-	-
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	-	-	-
		ISK5.1.9 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	-	-	-
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86	86	87,22	101,42%
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100	120,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian (%)
		ISK5.1.1 2	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89	-	-	-
		ISK5.1.1 3	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor \geq 100)
2		Hati-hati ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3		Buruk (Skor $<$ 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan I Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU Ke-1 ini diperoleh dari capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus

PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW I tahun 2022 IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 25% kepatuhan pelaku usaha. Capaian pada TW I melebihi dari yang ditargetkan yaitu dengan capaian 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 120,00%. Pelaku usaha yang di periksa sebanyak 3 pelaku usaha. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kompetensi telah diselenggarakan Bimtek.

Pencapaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW I tahun 2022 sama bila dibandingkan dengan capaian TW I tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya sebesar 100% dan di TW I tahun 2022 capaiannya sama yaitu sebesar 100%.Namun capaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW I tahun 2022 tidak dapat di bandingkan dengan capaian 5 tahun sebelumnya, karena IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa

kepatuhannya merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			
	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	25	100	120,00 %

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 130.923.000 dan sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 17.302.400 atau sebesar 13,22% . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini telah tercapai dari target Triwulan I dengan anggaran yang digunakan masih 13,22%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan unit usaha jenis ikan dilindungi yang diperiksa yaitu 1 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang dilindungi sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Pelaku usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
DAS Barumon di sekitar Panai Hulu dan Panai Tengah dan monitoring pelaku pengumpul ikan	- Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara gabungan bersama oleh tim Satwas. PSDKP Asahan, tim dari Dinas Perikanan Labuhan Batu, dan monitoring dari BPSPL Padang;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
<p>dilakukan di wilayah Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dilakukan terhadap 7 kapal nelayan kecil (tanpa nama) yang melakukan penangkapan ikan di DAS Barumun. Dari tujuh kapal yang diperiksa terdapat 6 kapal yang menggunakan jaring gillnet terubuk dan 1 kapal yang menggunakan alat tangkap jaring gulamah. Pada kegiatan ini petugas menyampaikan aturan terkait larangan penangkapan ikan Terubuk pada periode di bulan tertentu dengan cara lisan dan membagikan Selebaran (leaflet) serta menghimbau para nelayan untuk mematuhi; - Hasil tangkapan dari beberapa nelayan yang diperiksa ditemukan jenis ikan Terubuk dengan berat rata-rata 700- 800 gram dengan kondisi mati segar; <p>Tindak Lanjut terhadap kapal perikanan/nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan Terubuk di periode larangan, Pengawas Perikanan memerintahkan untuk segera mengangkat alat tangkapnya dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan perikanan dan menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi peraturan terkait larangan penangkapan terubuk pada periode waktu yang ditetapkan sesuai Kepmen Nomor 43/KEPMEN KP/2016.</p>

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.685.040,- (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.23.374.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 20,04%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan jenis ikan dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pelaksanaan tugas pengawasan jenis ikan dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan

sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya.

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada TW I tahun 2022 yaitu 0 pelaku usaha atau tidak terdapat capaian pengawasan karena belum ada pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa Kepatuhan nya

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada TW I tahun 2022 yaitu 0 pelaku usaha atau tidak terdapat capaian pengawasan karena belum ada pelaksanaan kegiatan.

4. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Adapun capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu 2 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Global Pasific Seafood Industry	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Global Pasific Seafood Industry berada di Kawasan Industri Medan; - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan ikan beku; - PT. Global Pasific Seafood Industry telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM. - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha nomor 8120108860184 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. - UKL-UPL Nomor 660.T/491/660.I/DS/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. <p>Izin Lingkungan Nomor 8120108860184, tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan Bupati Deli Serdang.</p>
PT. Sorby International Medan	<ul style="list-style-type: none"> - PT Sorby International Medan beralamat di Jl. Pulau Irian Kompleks Miel Nusantara I, Kawasan Industri Medan I No.3A, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara; - Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan dan pemasaran ikan yang memiliki tiga KBLI yaitu 10213 (Industri pembekuan ikan), 46206 (Perdagangan besar hasil perikanan), dan 10293 (Industri pembekuan biota air lainnya);

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - PT Sorby International Medan telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM. - Dokumen Perizinan yang dimiliki perusahaan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> - NIB nomor 9120105192189 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 28 Januari 2019. - Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati Kab. Deli Serdang (Kode KBLI 10213 dan 46206) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kode KBLI 10293) pada tanggal 28 Februari 2018.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.47.467.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 4,53%.

Pelaksanaan tugas pengawasan jenis ikan dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-2 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Capaian Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2022 tercapai 100% sesuai yang ditargetkan pada TW I tahun 2022 sebesar 100%. IKU ini dapat dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW I tahun 2021 dengan Capaian sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2022-2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kompetensi diselenggarakan Bimtek.

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) pemeriksaan kepatuhan subsektor perikanan, antara lain: (1) Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan, (2) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan, (3) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan, (4) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan.

Secara umum, pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan I tahun 2022, dengan melakukan kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara UPT dengan Satuan Pengawas dan Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.534.550.000 dan sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 141.108.735 atau sebesar 9,20%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat

disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar yaitu 9,20%.

Untuk Pembahasan capaian kepatuhan subsektor perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan.

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode triwulan I tahun 2022 sebanyak 1 unit usaha. Berdasarkan tahapan pemeriksaan telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/ikan bersirip) di Laut milik Nasiruddin. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2022 sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Nasiruddin	Pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal perikanan. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pemilik kapal perikanan Bpk. Nasiruddin telah memenuhi standar usaha KBLI yang tercantum dalam Permen KP tentang kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan usaha berbasis resiko dengan nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.473.218,- (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar RP. 555.000.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) atau sebesar 11,08%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen

PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 9. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidaya ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha pembudidaya ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode triwulan I tahun 2022 sebanyak 8 unit usaha budidaya. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2022 sebagaimana tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	Waternis - Alfin Farm	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 86,5%, dalam kategori Baik.

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
2	Suhaimi - Graha Pratama Fish	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik
3	Firman Edi	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik.
4	Guntur	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik.
5	Johari	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 90,5%, dalam kategori Baik.
6	Rozali	03211 - Pembesaran	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
		pisces / ikan bersirip laut	bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 87,1%, dalam kategori Baik.
7	Habil Rifqy	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.
8	Fahrur Razi	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Baik.

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Capaian IKU ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan I tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra.

Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.571.333,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*) atau sebesar 9,26%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan

			-Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode triwulan I tahun 2022 sebanyak 3 unit usaha UPI. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2022 sebagaimana tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	Doni Fajri - Hanafa Food	10794 - Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	- Lokasi di Jl. Melati, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru; - NIB 0220004840287; - NPWP 686585605216000; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 61,7%.
2	PT SORBY INTERNATIONAL MEDAN	a. 10213 - Industri Pembekuan Ikan	- Lokasi di Jl. Pulau Irian Kompleks Miel Nusantara I, Kawasan Industri Medan I No.3A, Sampali, Kec. Percut Sei

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
		b. 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; - NIB 9120105192189; - NPWP 02.419.025.8-059.000; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 80%.
3	Nurmasyitah - UD Pangkaina	10219 - Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	- Lokasi di Desa Pante Paku, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun; - NPWP 162164347104000; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 70%.

Capaian SUB IKU ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan I tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra yaitu 100%. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.357.784,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 242.550.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) atau sebesar 4,27%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran masih sebesar 4,27% .

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor

pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

- d. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan
- Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode triwulan I tahun 2022 sebanyak 1 unit usaha yaitu PT Sorby International Medan.

Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I tahun 2022 sebagaimana tabel 14 dibawah ini:

Tabel 14. Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	PT SORBY INTERNATIONAL MEDAN	46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Pulau Irian Kompleks Miel Nusantara I, Kawasan Industri Medan I No.3A, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; - NIB 9120105192189; - NPWP 02.419.025.8-059.000; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 93%, dalam kategori Baik Sekali.

Capaian IKU 2022 ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan I tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.706.400,- (Tiga Belas Juta Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi

sebesar Rp. 137.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*) atau sebesar 10 %. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran masih sebesar 10%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-3 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”**. Capaian IKU “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” dengan target yang ditetapkan sebesar 87%. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form Keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Belawan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmaswas yang dianggap **aktif** bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan

melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode triwulan IV 2022. Pada TW I Tahun 2022 IKU belum dilaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS yang aktif dengan melakukan pelaporan dan pengisian Form Pembinaan POKMASWAS. Capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP TW I pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW I pada tahun 2021 karena beda IKU. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dialokasikan sebesar Rp. 163.635.000,- (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 0%.

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi dengan Seditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas.

Pelaksanaan tugas pengawasan pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK 3.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas, IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas, IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP. Adapun capaian dari SK3.2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87.5	-	-
2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	87.5	-	-
3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	-	-

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW I Tahun 2021. IKU ini akan dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.604.118.000 dan sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 4.160.722.343 atau sebesar 27,01% . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 27,01%. Penjelasan masing-masing IKU pada SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan

SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
- 5) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
- 6) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 7) Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
- 8) Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.
- 9) Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing* dan pelanggaran kelautan lainnya

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan I tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran target IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW I Tahun 2021. IKU ini akan dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dialokasikan sebesar Rp.15.441.314.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi

Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
- 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 6) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa.

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan I tahun 2022 tidak dilakukan Pengukuran Kinerja pada IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW I Tahun 2021. IKU ini akan dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dialokasikan sebesar Rp.162.804.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 16.212.000 atau sebesar 9,96% . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 9,96%.

IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Kategori Penilaian Pemenuhan Logistik

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 - 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 - 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 - 75	B	Terpenuhi
4	76 - 100	A	Sangat Terpenuhi

Pada Triwulan I tahun 2022 belum dilakukan pengukuran pada IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan pada tahun 2022 dengan target pada TW II dan TW IV sebesar 90. Capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP pada Triwulan I tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2021, hal tersebut dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2022.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.572.553.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.12.473.908.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 28,64%.

5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU**

Ke-7 “Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”. Adapun Capaian IKU Ke-7 pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 10. Capaian IKU pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU dari SK3.3 sebagai berikut:

IKU Ke-7 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan meliputi: 3 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit *Speedboat* Pengawas.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW I Tahun 2022 IKU Ke-7 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak Tahun 2021 dan bila dibandingkan pada capaian TW I tahun 2022, IKU ini sama-sama belum ada capaian Kinerja

Baik TW I 2021 maupun 2022. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.118.431.915,- (Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.4.111.730.000,- (Empat Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 2,88%.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: **(1) IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan; (3) IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (4) IKU Ke-11 Persentase Efektivitas penerapan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (5) IKU-12 Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.** Adapun Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif sebagaimana Tabel 16 berikut.

Tabel 11. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	35	96
2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan	93%	10	90
3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	10	86

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
4	Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	0	0
5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	0	0

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK4.1 sebagai berikut:

1) IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW I tahun 2022 IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan tercapai 96% dari Target 35%. Tercapaiannya target pada IKU ke-8 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana Tabel 17 berikut.

Tabel 12. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

No	Perkara	Tersangka	Tanggal Tertangkap	TW I		Capaian TW I
				Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja	
1	KM. PKFB 1337	MUHAMMAD FITRIADI	13 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	96%
2	KM. KHF 1971	NAI TOO	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
3	KM. KF 2447	HERMANSYAH	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
4	KM. PKFA 7496	JAKA SITORUS	5 Februari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
5	KM. PKFA 9546	AUNG KYAW SOE	26 Maret 2022	Pemeriksaan (Resume dan Sampul Berkas Perkara)	80%	

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW I tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Pada TW I 2022 belum ada realisasi anggaran, karena belum ada kasus yang di tangani. Untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 272.850.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%. Realisasi anggaran akan tercapai pada saat kasus telah diselesaikan sampai tahapan (P-21) berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa.

2) IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan (%)

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari

tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW I tahun 2022 IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 90% dari Target 10%. Tercapaiannya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan sebagaimana Tabel 18 berikut.

Tabel 13. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan

UPT	NAMA BARANG BUKTI UTAMA		NAMA TERSANGKA	POSISI BB UTAMA	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
STASIUN PSDKP BELAWAN	1	PKFB 1337	Muhammad Fitriadi	TPI Purnama Dumai	100%	90%
	2	KF 2447	Hermansyah	TPI Purnama Dumai	100%	
	3	PKFA 7496	Jaka Sitorus	TPI Purnama Dumai	100%	
	4	KHF 1971	Nai Too	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	100%	
	5	PKFA 9546	Aung Kyaw Soe	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	50%	

Capaian IKU ke-9 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW I tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Walaupun saat ini proses Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian barang bukti identitas realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum terealisasi atau sebesar Rp.0,- dari total anggaran Rp. 113.704.000,- dengan

persentase realisasi anggaran sebesar 0%. Realisasi anggaran akan tercapai apabila berkas perkara barang bukti diserahkan ke kejaksaan atau penitipan barang bukti ke RUPABASAN.

3) IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Pada TW I tahun 2022 IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 86% dari Target 10%. Tercapaiannya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Capaian IKU ke-10 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW I tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp.5.354.000,- dari total anggaran Rp.278.4000.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 1,92%.

4) IKU Ke-11 Persentase Efektivitas penenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas penenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang

Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada TW I tahun 2022 IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDP Belawan tidak ada target capaian, IKU ini ditargetkan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan capaian sebesar 80%.

Capaian IKU ke-11 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW I tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada terealisasi atau sebesar Rp. 0,- dari total anggaran Rp.40.000.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%.

- 5) IKU-12 Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada TW I Tahun 2022 Stasiun belum melaksanakan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, sehingga belum ada capaian IKU pada TW I Tahun 2022. IKU ini di targetkan akan teralisasi pada TW IV Tahun 2022 dengan target capaian sebesar 80%. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada terealisasi atau sebesar Rp. 0,- dari total anggaran Rp.50.714.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%.

7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian SK5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU dan 13 (tiga) IK. IKU tersebut terdiri dari: **(1) IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (2) IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks) (3) IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (4) IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (5) IK Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (6) IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; (7) IK Ke-19 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi); (8) IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (9) IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (10) IK Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (11) IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); (12) IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) (nilai); (13) IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai).**

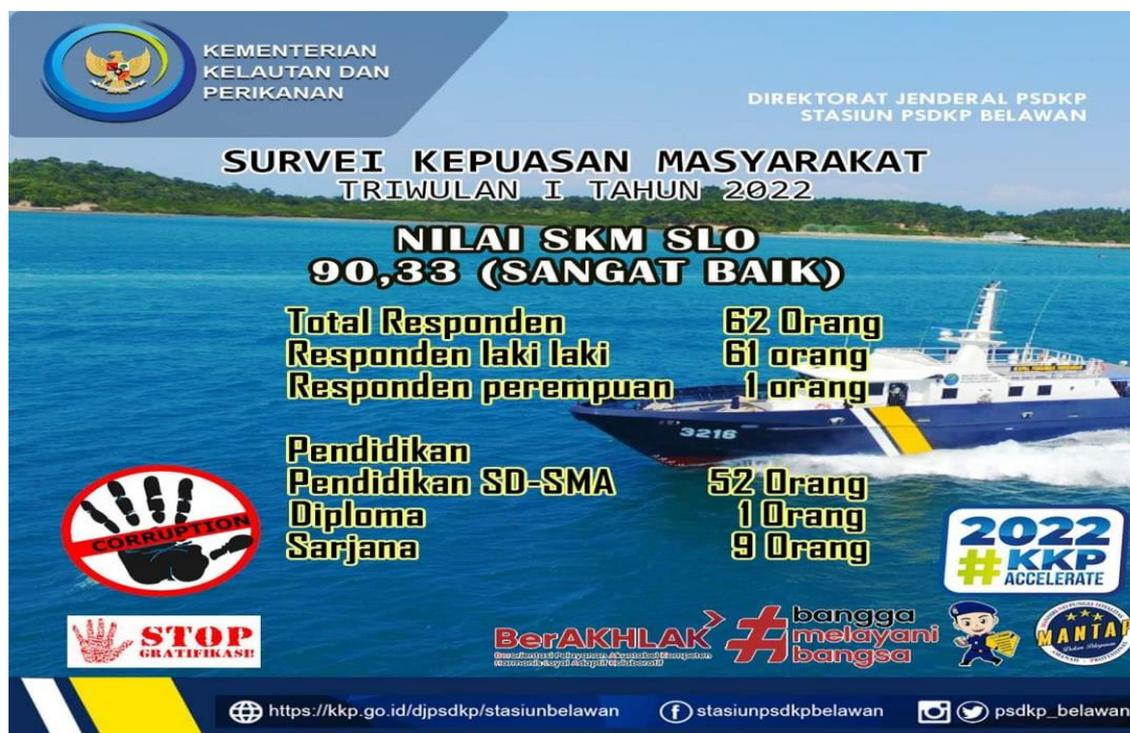
Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK5.1 sebagai berikut:

IKU Ke- 13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-13 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan I Tahun 2022 tercapai 90,33%, dari target yang telah ditetapkan pada TW I tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 112,91%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan TW I tahun 2021 terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 1,41%, karena capaian Pada TW I tahun 2021 IKU

ke-13 ini sebesar 88,92%. Survei dilakukan terhadap 62 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1.

Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan belum terealisasi.

IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-14 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna LVHPI pada Triwulan I Tahun 2022 tercapai 91,75, dari target yang telah ditetapkan pada TW I tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 114,69%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan

berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2021 IKU ke-14 mengalami peningkatan persentase capaian sebesar 1,28%, karena pada TW I tahun 2022 capaiannya sebesar 90,47%. Survei dilakukan terhadap 11 orang pengguna jasa layanan LVHPI yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU LVHPI belum terealisasi.

IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

Penilaian untuk IK Ke-15 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada periode TW I tahun 2022 IK ke-15 belum ada capaian, IK ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada TW IV tahun 2022.

IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-16 yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *assessment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *e-presensi mobile*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan I Tahun 2022 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor. IKU Ke-16 diukur per semester yaitu dengan perhitungan pada Semester I dengan target 70 dan Semester II dengan target 77 pada tahun 2022.

IK ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP

maupun Biro perencanaan KKP. Pada TW I tahun 2022 IK ke-17 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan target nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 90.

IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen. PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari: (1) Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker; (2) Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. IK Ke-18 ini akan dilakukan pengukuran pada TW IV dengan target yang ditetapkan 21. IK Ke-18 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2021 dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2022.

IK Ke-19 Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang di hasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-19 Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Perhitungan jumlah inovasi diperoleh melalui perumusan inovasi dari 5 (lima) Satuan Kerja Pusat. **Setiap Satuan Kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi.** Tahun 2022 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Pencapaian kinerja pada TW I tahun 2022 belum dihitung, perhitungan pencapaian IK ini pada TW IV tahun 2022.

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-20 pada periode TW I tahun 2022 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2022 dengan target nilai 75%.

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-21 pada periode TW I tahun 2022 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2022 dengan target nilai 75%.

IK Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 86% pertriwulan pada tahun 2022. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan I tahun 2022 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW I sebesar 87,22% melebihi dari target yang di tetapkan pada TW I yaitu sebesar 86%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IK pada TW I tahun 2021, IK Ke-22 ini mengalami penurunan sebesar 11,67% dibandingkan dengan capaian TW I tahun 2021 sebesar 98,89%, Capaian IK Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar 4 berikut



Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab). UPT yang tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan ditindaklanjuti maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan pengawasan Inspektorat Jenderal bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi. Pada TW I tahun 2022, Stasiun PSDKP Belawan tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan ditindaklanjuti sehingga IK ke-23 ini di anggap tercapai sesuai target yaitu 70% dengan persentase capaian 100%. IK ke-23 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2021 dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2022. Pada TW I Tahun 2022 IK ini di targetkan sebesar 70%, dengan realisasi capaian pada TW I 2022 sebesar 70% atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (Delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I Tahun 2022 **tidak dilakukan pengukuran**. IK ke-24 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2021, karena pada TW I tahun 2021 capaiannya 91,02% sementara pada TW I tahun 2022 IKU ini tidak di lakukan penghitungan.

IK Ke-24 akan dilakukan pengukuran pada tiap semester, dengan target yang ditetapkan pada Semester I sebesar 80% dan Semester II sebesar 89 pada tahun 2022.

IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). IK ke-25 pada periode TW I tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada TW I tahun 2021, karena IKU ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. IK ini akan diukur kinerjanya pada TW IV tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81.

3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2022 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA – 032.05.2.440831/2022 tanggal 14 Desember 2021, mendapat alokasi dana sebesar **34.265.069.000,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai dengan 31 Maret 2022 (Triwulan I) sebesar **19,47%** atau sebesar Rp **6.672.377.324,-** (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel.19 berikut:

Tabel 14. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2022

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Peningkatan Operasional Pengoperasian Kapal Pengawas	19.879.483.000	4.295.366.258	21,61	15.584.116.742
2351	Program Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	755.668.000	5.354.000	0,71	750.314.000
2352	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	130.923.000	17.302.040	13,22	113.620.960
2353	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.534.550.000	141.108.735	9,2	1.393.441.265
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.964.445.000	2.213.246.291	18,5	9.751.198.709
TOTAL		34.265.069.000	6.672.377.324	19,47	27.592.691.676

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Perlunya Sosialisasi tentang tahapan pemeriksaan teknis pengawasan kepatuhan usaha perikanan sesuai Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pengawasan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan;
2. Perlunya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan secara berkala.

Rencana tindak lanjut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pengawasan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan Kepada Pengawas Perikanan.

2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan secara berkala.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Fahrulsyah**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Andri Fahrulsyah

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STASIUN PSDKP BELAWAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (Indeks)	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase efektifitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase efektifitas penyelesaian penanganan barang bukti Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase efektifitas penyelesaian penanganan awak kapal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase efektifitas penerapan sanksi administratif Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase efektifitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang di hasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	130.923.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.534.550.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	19.879.483.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	755.668.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.964.445.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		34.265.069.000

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Adin Nurawaluddin



Andri Fahrulisyah

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	202.247.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.535.732.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12.877.057.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	272.435.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13.199.715.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		28.087.186.000

Jakarta, 25 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap


Adin Nurawaluddin


Erik Sostenes